

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KENDAL 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KENDAL 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KENDAL **2021**

ISBN : 978-623-92625-6-3

Katalog : 4102004.3324

No. Publikasi : 33240.2129

Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 50 halaman

Naskah:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dicetak Oleh:

CV. Mitra Jaya Mandiri

Tahun Cetak:

2021

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Ummi Hastuti, M.Si

Penanggung Jawab

Irma Nur Afifah, SST, M.Si

Penyunting

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penulis

Irma Nur Afifah, SST, M.Si

Penyusun:

Irma Nur Afifah

Cover:

Suliatun

*Sumber Ilustrasi:
Pinterest
Freepik
Canva*

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu.

Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional, serta data sekunder dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2021 diharapkan mampu menjembatani antara penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang.

Kendal, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kendal

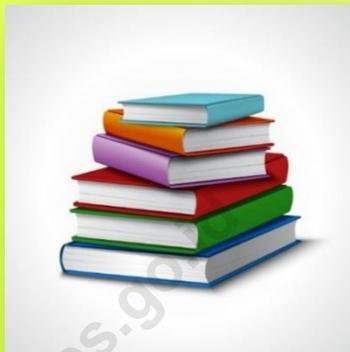


Dra. Ummi Hastuti, M.Si
NIP. 19640813 199003 1 002



Daftar Isi

Katalog	i
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi



Pendahuluan	13
Bab 1	
Kependudukan	15
Bab 2	
Kesehatan dan Gizi	29
Bab 3	
Pendidikan	38

51	Bab 4
	Ketenagakerjaan
59	Bab 5
	Kemiskinan
64	Kesimpulan
67	Daftar Pustaka



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kendal, 2016-2020.....	17
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015-2020.....	21
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kendal, 2016-2020.....	24
Tabel 1.4	Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2017-2020	25
Tabel 1.5	Jumlah Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal, 2019-2020.....	26
Tabel 2.1	Angka Kesakitan menurut Karakteristik Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020.....	32
Tabel 2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2018-2020	33
Tabel 2.3	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan dan Berobat jalan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Kendal 2018-2020.....	34
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2019-2020.....	35
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang diberi ASI di Kabupaten Kendal, Tahun 2019-2020.....	36
Tabel 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal (tahun), 2015-2021.....	42
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, Tahun 2020.....	44
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kendal, 2016-2020.....	46
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2016-2020.....	46
Tabel 3.5	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Kendal, Tahun 2019/2020 – 2020/2021.....	48
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Kendal, 2019/2020-2020/2021	49

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal, 2017-2021 ...	53
Tabel 4.2	Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2020.....	54
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Sektor di Kabupaten Kendal, 2017-2020.....	55
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk 15+ Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020.....	56
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Kendal, Tahun 2019.....	57
Tabel 5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020.....	60
Tabel 5.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal, Tahun 2015-2019.....	62

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kabupaten Kendal, Tahun 2020	18
Gambar 1.2	Persentase Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2020.....	19
Gambar 1.3	Persentase Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2019-2020.....	22
Gambar 1.4	Persentase Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal, Tahun 2020.....	27
Gambar 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal (tahun), 2016-2021	43
Gambar 5.1	Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015-	61
Gambar 5.2	Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015-	61



PENDAHULUAN

TUJUAN

Publikasi Indikator Kesejahteraan ini disusun untuk mengetahui gambaran tentang:

- Kondisi Demografi antara lain jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Rasio Jenis Kelamin, persebaran dan kepadatan penduduk, angka beban ketergantungan dan Keluarga Berencana (KB) di Kendal.
- Kondisi Kesehatan dan Gizi meliputi derajat kesehatan, morbiditas, fasilitas dan jaminan kesehatan, tingkat imunitas dan gizi balita
- Kondisi Pendidikan meliputi: Pendidikan yang ditamatkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- Kondisi Ketenagakerjaan meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- Kemiskinan mencakup Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Keparahan Kemiskinan dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan

RUANG LINGKUP

Publikasi Indikator Kesejahteraan ini menyajikan perkembangan kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal periode 2020 serta 3 hingga 5 tahun sebelumnya untuk melihat tren perkembangan kesejahteraan berdasarkan indikator-indikator demografi dan sosial terkait.

METODOLOGI

Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta data sekunder dari instansi lain di luar BPS.

SEKILAS PERISTIWA

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid19 melanda di sebagian besar negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, tak terhindar dari kasus Covid19.

Berbagai upaya Pemerintah terus digalakkan guna menekan laju tertular Covid19.

Pandemi ini berdampak pada kesehatan yang berdampak pada aktivitas ekonomi, pun berdampak pada tingkat kesejahteraan yaitu pada indikator kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana diulas dalam publikasi ini

INDIKATOR KEPENDUDUKAN KABUPATEN KENDAL 2021



Jumlah Penduduk Hasil
SP2020 Kabupaten Kendal
1.018.505 jiwa



Jumlah Penduduk
Laki-laki: 514.795 jiwa



Jumlah Penduduk
Perempuan: 503.710
jiwa



Pertumbuhan
Penduduk 0,70
persen per tahun



Rasio Jenis
Kelamin
102,71



Kepadatan Penduduk
1.010 jiwa/km²



Angka Beban Ketergantungan
42,28 persen



BAB I

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu ruang atau wilayah tertentu selama periode waktu 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2020). Keberadaan penduduk bagi suatu negara sangatlah penting, namun pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan akan menimbulkan berbagai problem sosial. Itulah mengapa kemudian muncul berbagai teori kependudukan yang dikemukakan para ahli. Teori yang banyak digunakan oleh berbagai negara adalah teori Neo-Malthusian yang menyebutkan bahwa cara untuk membatasi jumlah penduduk adalah menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut kemudian diterapkan di Indonesia dengan program Keluarga Berencana (KB).

Urgensi dari pengendalian jumlah penduduk ini dilakukan untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak. Karena jika kebutuhan hidup dasar tersebut tidak mampu terpenuhi, akan timbul berbagai masalah yang mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak cukup akan menimbulkan kelaparan, meningkatkan angka gizi buruk balita hingga sampai pada peningkatan jumlah kematian penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berimbas pada kurangnya ketersediaan pemukiman yang pada akhirnya dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak.

Masalah lain yang dapat timbul di antaranya terjadinya peningkatan kriminalitas dan gangguan keamanan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai serta rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas. Masalah kependudukan merupakan salah satu aspek penting dan perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Selain tingkat pertumbuhan penduduk (sisi kuantitas), masalah kualitas sumber daya manusia, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.





JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kendal tahun 2020 tercatat sebanyak 972.063 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 977.610 jiwa. Sedangkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) sebanyak 1.018.505 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 514.795 jiwa dan perempuan 503.710 jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk per tahun bukanlah masalah yang kecil. Ledakan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah berantai apabila tidak diatasi dengan tepat.

Salah satu upaya untuk mengatasi jumlah penduduk di Indonesia termasuk di Kendal adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB akan lebih optimal jika seluruh lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan akan pentingnya program tersebut. Jika program KB ini bisa berjalan dengan optimal, kesejahteraan masyarakat juga akan lebih meningkat karena program KB tujuannya berorientasi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya. Laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2016-2020 tercatat mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan keberhasilan program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.



LAJU PERTUMBUHAN

Tahun 2016 penduduk Kendal tercatat jumlah penduduk sejumlah 949.682 jiwa atau bertambah sebanyak 7.452 jiwa. Pertambahan penduduk Kendal di tahun 2017 sejumlah 7.272, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, pertambahan penduduk Kendal hanya sejumlah 6.693 jiwa, tahun 2020 penduduk



Kendal bertambah sebanyak 6.831 jiwa.

Secara persentase laju pertumbuhan penduduk Kendal tahun 2016 sebesar 0,79 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,70 persen.

Selama periode 2016-2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal terlihat semakin menurun, seperti disajikan pada Tabel 1.1.

Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan, pada tahun 2020 terlihat Kecamatan Boja memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1.68 persen, disusul Kecamatan Kaliwungu Selatan sebesar 3,02 persen, Kecamatan Boja sebesar 2,81 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Sukorejo sebesar 0,55 persen.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kendal, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah	Laju	Rasio Jenis Kelamin
	(Jiwa)	Pertambahan	Pertumbuhan per tahun (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	949.682	7.399	0,79	102,79
2017	957.024	7.342	0,77	102,79
2018	964.106	7.082	0,74	102,76
2019	971.086	6.980	0,72	102,74
2020 ¹	977.917	6.831	0.70	102,71
2020 ²	1.018.505	47.419	1,20 ³	102,20

Sumber:

- 1) Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2020
- 2) Sensus Penduduk 2020
- 3) Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020

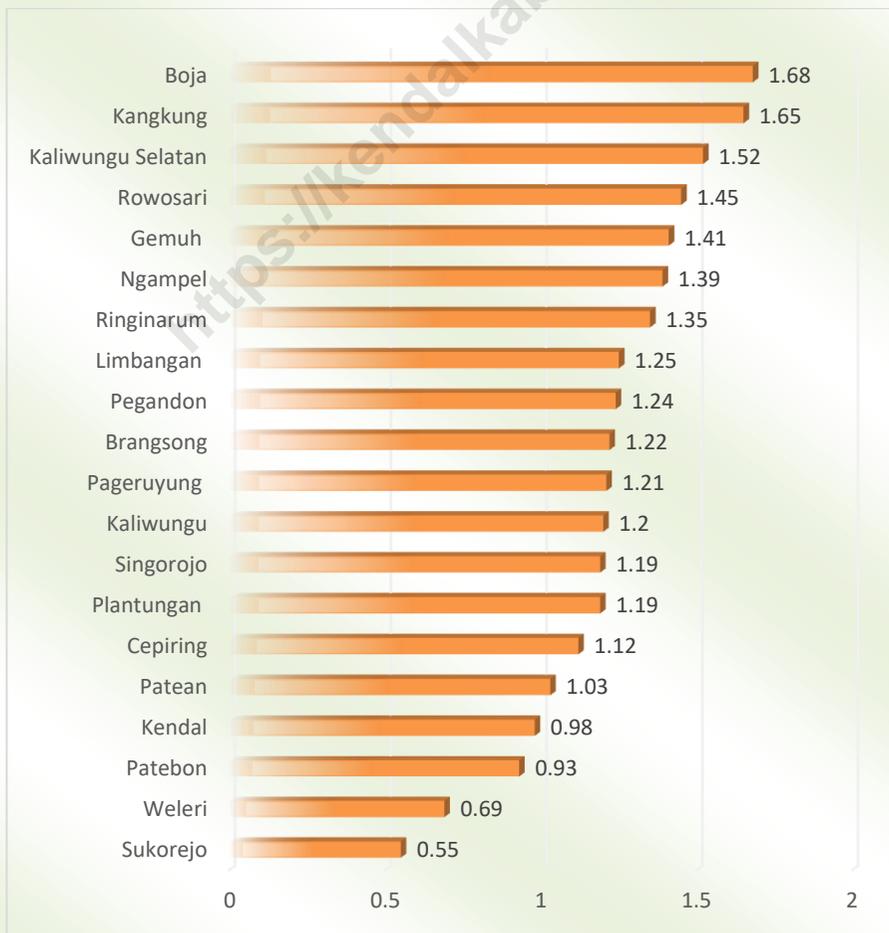
RASIO JENIS KELAMIN

Salah satu diantara indikator kependudukan yang sering menjadi dasar pengambilan kebijakan adalah tingkat rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Secara umum, indikator tersebut memberikan gambaran perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Kajian kependudukan yang didasarkan pada perbandingan jenis kelamin tersebut biasanya guna menerangkan tingkat kesetaraan gender. Di Indonesia banyak terdapat beranekaragam adat kebudayaan, dimana memberikan pengaruh secara langsung terhadap tingkat kesetaraan gender. Sistem garis keturunan yang

bersifat patrilineal (garis laki-laki) secara langsung berpengaruh pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya berpengaruh pada komposisi penduduk dalam kegiatan ekonomi.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kendal pada tahun 2020 sebesar 102,71. Angka ini berarti jika pada suatu komunitas terdapat 102 orang, maka akan terdiri dari 100 perempuan dan 102 laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kendal lebih banyak daripada jumlah penduduk Perempuan. Kondisi yang sama terjadi di sebagian besar kecamatan di Kendal dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100. Pada tahun 2020 hanya ada satu kecamatan yang rasio jenis kelaminnya kurang dari 100, yakni Kecamatan Cepiring dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 99,90 persen. Artinya, penduduk perempuan pada kecamatan tersebut lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020





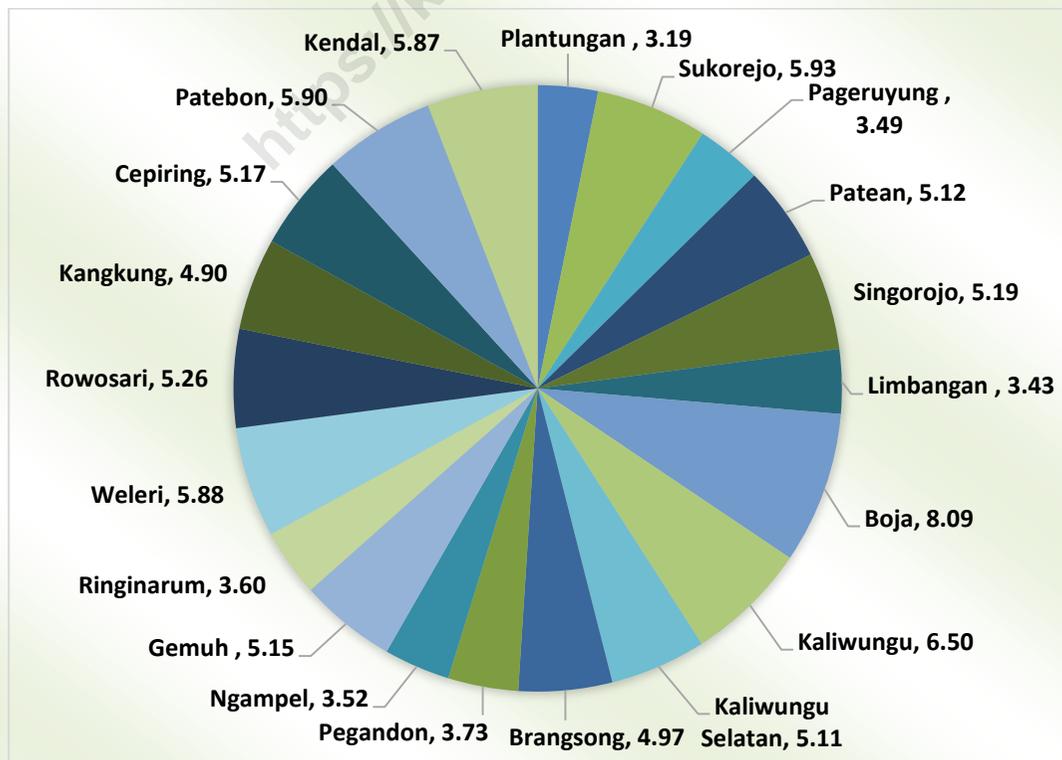
DISTRIBUSI, PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

PESEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi atau persebaran penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya apabila tidak ditangani dan dikendalikan dengan tepat.

Gambar 1.2. Persentase Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2020



Distribusi penduduk di Kendal, tergolong belum merata, hal ini terlihat ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan kurangnya optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ditinjau berdasarkan masing-masing kecamatan, pada tahun 2020 terdapat 2 kecamatan dengan kepadatan lebih dari 2.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Kendal, yang merupakan ibukota dari Kabupaten Kendal, memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 2.143 jiwa/km², diikuti Kecamatan Weleri 2.039 jiwa/km², dan terpadat ketiga adalah Kecamatan Cepiring sebanyak 1.785 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Singorojo yang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Kendal memiliki kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 442 jiwa/km². Sebanyak 16 kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk, sedangkan 4 kecamatan lainnya mengalami penurunan tingkat kepadatan penduduk, yaitu Kecamatan Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu dan Kendal.

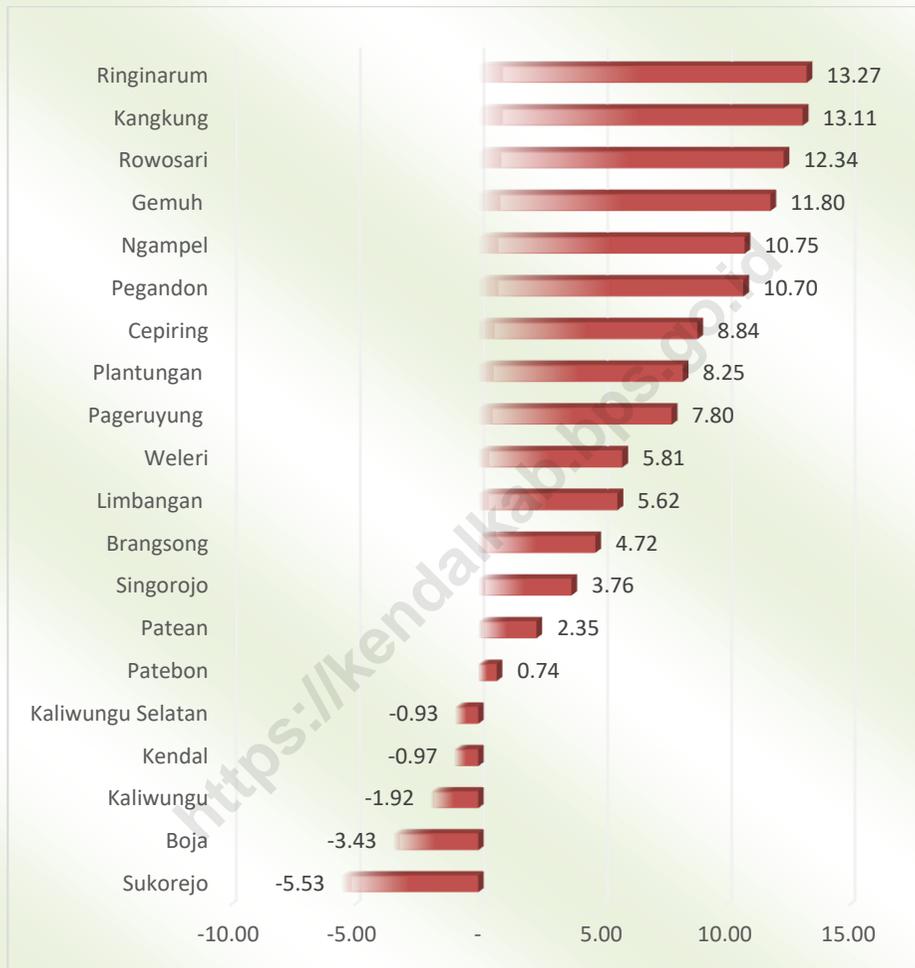


**Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kendal, Tahun 2015-2020**

Kecamatan		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Plantungan	601	603	604	605	606	656
020	Sukorejo	798	806	815	823	832	786
030	Pageruyung	631	634	636	639	641	691
040	Patean	534	539	544	549	554	567
050	Singorojo	412	416	419	423	426	442
060	Limbangan	449	452	456	460	463	489
070	Boja	1.179	1.198	1.217	1.235	1.254	1.211
080	Kaliwungu	1.301	1.315	1.329	1.343	1.356	1330
081	Kaliwungu Selatan	725	732	740	748	755	748
090	Brangsong	1.356	1.367	1.377	1.388	1.398	1.464
100	Pegandon	1.109	1.115	1.121	1.127	1.131	1.252
101	Ngampel	948	953	958	963	967	1.071
110	Gemuh	1.215	1.219	1.223	1.226	1.229	1.374
111	Ringinarum	1.386	1.391	1.395	1.399	1.402	1.588
120	Weleri	1.895	1.904	1.912	1.920	1.927	2.039
130	Rowosari	1.444	1.448	1.452	1.456	1.459	1.639
140	Kangkung	1.124	1.132	1.139	1.146	1.152	1.303
150	Cepiring	1.610	1.618	1.626	1.633	1.640	1.785
160	Patebon	1.302	1.315	1.327	1.339	1.351	1.361
170	Kendal	2.083	2.103	2.124	2.145	2.164	2.143
Kabupaten Kendal		941	948	955	963	969	1.010

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Gambar 1.3 Persentase Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2019-2020



Secara total, perkembangan kepadatan penduduk selama 2019-2020 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif di 16 kecamatan, sedangkan 4 kecamatan lainnya negative, mengindikasikan bahwa terjadi pengurangan tingkat kepadatan penduduk. Apabila diamati per wilayah, perkembangan kepadatan penduduk di Kecamatan Ringinarum memiliki laju paling tinggi dengan rata-rata kecepatan laju kepadatan penduduknya sebesar 13,27 persen selama setahun. Selanjutnya, laju kepadatan penduduk tercepat diikuti oleh Kecamatan Kangkung, dengan laju 13,11 persen, diikuti Kecamatan Rowosari dengan laju 12,34 persen selama satu tahun terakhir. Selengkapny disajikan pada Gambar 1.2 untuk melihat laju kepadatan penduduk satu tahun terakhir menurut kecamatan di Kabupaten Kendal.



ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Masalah lain yang timbul sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk adalah semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting untuk melihat tingkat produktifitas penduduk. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil bisa diartikan telah ada kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN PENDUDUK

Selama periode 2016-2020 angka beban ketergantungan di Kendal cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan program pemerintah terkait pengendalian penduduk dapat dikatakan cukup berhasil karena semakin sedikit beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan Kendal sebesar 46,06 persen. Meskipun lambat, angka beban ketergantungan Kendal terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 berada pada posisi 45,52 persen dan tahun 2020 dari hasil proyeksi pada posisi 42,28 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 42 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).



Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kendal, 2016-2020

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	231.572	651.328	66.832	45,81
2017	230.532	657.147	69.325	45,63
2018	229.666	662.573	72.069	45,54
2019	228.659	667.282	75.060	45,52
2020	224.793	711.214	75.932	42,28

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Rasio ketergantungan yang cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong produksi, yaitu saat terjadi fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa bonus demografi mempunyai dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik.

Jika dilihat berdasarkan komposisi penduduk sesuai dengan kelompok umur, menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2015 ada sebanyak 24,96 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2019, proporsi penduduk usia muda di Kendal turun menjadi 23,55 persen dan tahun 2020 sebesar 22,21 persen.

Salah satu misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2016-2021 adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.” Jika melihat komposisi usia muda yang proporsinya semakin menurun dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah Kendal dalam pengendalian penduduk cukup berhasil menekan angka kelahiran penduduk.

Selanjutnya struktur umur penduduk Kendal selama periode 2015-2019 masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Proporsi penduduk usia produktif di Kendal pada tahun 2015 mencapai 68,46 persen dan terus meningkat mencapai 68,72 persen di tahun 2019. Sementara itu, proporsi penduduk usia tua (65 tahun keatas) juga semakin lama semakin meningkat dari 6,85 persen di tahun 2015 hingga mencapai 7,73 persen di tahun 2019. Keadaan ini menunjukkan bahwa program peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kendal cukup berhasil terutama dalam meningkatkan kondisi kesehatan lansia sehingga para lansia tersebut mampu menikmati kehidupan yang lebih lama.



PENGGUNAAN ALAT ATAU CARA KB

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Penerapan program KB dilakukan dengan pengenalan berbagai jenis alat kontrasepsi ke masyarakat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan dengan lebih baik lagi.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2017-2020

Status Penggunaan Alat/ Cara KB	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pernah KB	18,45	12,64	19,52	13,87
Sedang Menggunakan	55,20	59,69	52,99	51,75
Tidak Pernah	26,35	27,67	27,49	34,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SUSENAS

Capaian yang patut diapresiasi bahwa berdasarkan data Susenas, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2019 sebesar 52,99 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 59,69 persen, dan di tahun 2020 sebanyak 51,75 persen. Meski menurun namun masih cukup tinggi yaitu lebih dari 50 persen. Disisi lain persentase yang pernah KB meningkat dari 12,64 persen menjadi 19,52 persen, namun menurun di tahun 2020 sebesar 13,87 persen.

Seseorang menentukan pilihan dalam penggunaan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, harga, kepraktisan dalam penggunaan, efisiensi, tingkat resiko kegagalan serta resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan kenyamanan bagi penggunanya. Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kendal namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntik dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya.

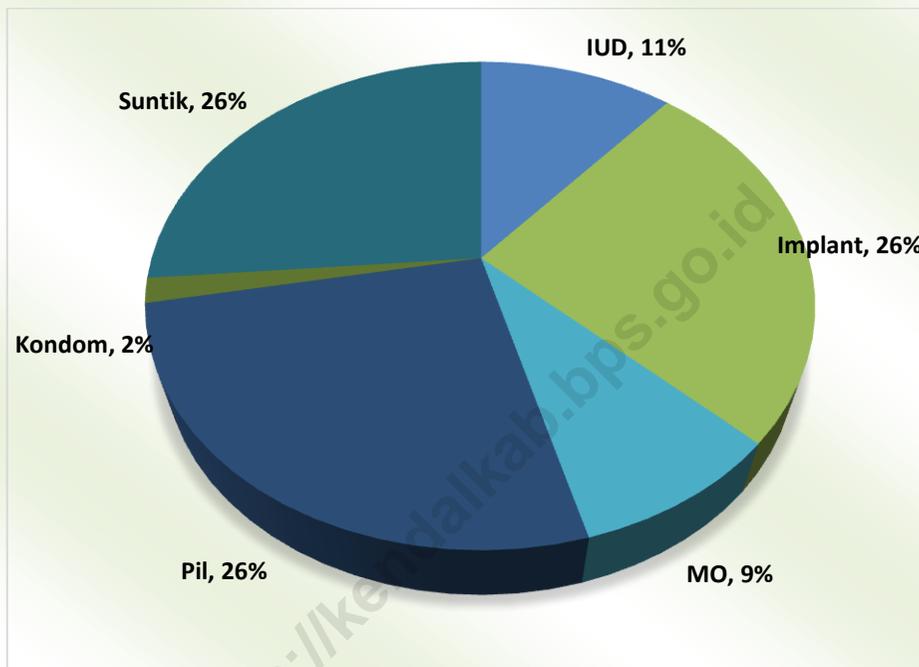
Kepala BKKBN menyatakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan MKJP akan lebih efektif. Namun, tidak mudah untuk mendorong masyarakat agar mau menggunakan alat KB MKJP. Terbukti peserta Akseptor KB tahun 2020 tercatat sebanyak 71.654 peserta, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 130.058 peserta. Data menunjukkan bahwa alat kontrasepsi yang paling digunakan adalah KB suntik dan pil, sebesar 26,32 persen akseptor KB menggunakan metode ini. Penggunaan alat/cara KB jangka pendek terbesar kedua adalah implant sebanyak 25.70 persen dari total akseptor KB. Jumlah ini meningkat di banding tahun 2019.

Tabel 1.5 Jumlah Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal, 2019-2020

Jenis Kontrasepsi	Jumlah Akseptor		Persentase Akseptor KB	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IUD	8.182	8.076	6,29	11,27
Implant	17.594	18.417	13,53	25,70
MO	6.171	6.274	4,74	8,76
Pil	18.828	18.860	14,48	26,32
Kondom	740	1.167	0,57	1,63
Suntik	78.543	18.860	60,39	26,32
Jumlah	130.058	71.654	100,00	100,00

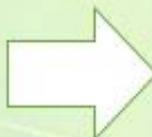
Sumber: DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Gambar 1.4. Persentase Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal Tahun 2020



INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI KABUPATEN KENDAL

2021



Program Pemerintah:
pemberian layanan
pemeriksaan gratis



Morbiditas atau Angka
Kesakitan Kabupaten
Kendal Tahun 2020 sebesar:
16,95 persen

Jumlah Fasilitas Kesehatan
2020



Rumah Sakit
Umum; 5

Puskesmas;
30

Klinik/Balai
Kesehatan;
51

Posyandu
; 1.433



BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses serta dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Umur yang panjang dan hidup yang sehat merupakan harapan bagi setiap individu. Individu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, serta lebih produktif dibandingkan individu yang kurang sehat. Selain itu, hidup akan menjadi kurang berarti apabila diberikan usia yang panjang namun rentan terserang penyakit ataupun mengidap penyakit kronis. Pemerintah selaku pemegang wewenang memiliki peran pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Namun, mewujudkan penduduk dengan umur yang panjang dan hidup yang sehat bukan hanya penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam penetapan standar peningkatan Kesehatan adalah menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sejak April 2016 Kementerian Kesehatan RI menyosialisasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Inti dari program tersebut adalah pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, dari perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Program tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kematian akibat penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, hingga kanker yang lebih banyak diakibatkan oleh perilaku tidak sehatnya masyarakat Indonesia. Padahal, hampir 90 persen penyakit berkategori penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, HIV AIDS, diabetes, dan lain sebagainya sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan GERMAS meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan,



pengecahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan edukasi hidup sehat.

Pemerintah Kabupaten Kendal menuangkan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam RPJMD 2016-2021 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan Angka Kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan bidang kesehatan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Program di bidang kesehatan tersebut tidak akan pernah berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, penguatan peran masyarakat untuk lebih bertanggungjawab atas derajat kesehatannya sendiri dan fasilitasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyadarkan dan menumbuhkan kemampuan upaya kesehatan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk menilai sejauh mana efektifitas program pemerintah di bidang kesehatan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, perlu dirumuskan berbagai indikator di bidang kesehatan.

Pandemi Covid19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia telah menimbulkan dampak angka kematian yang meningkat selama 2020-2021. kasus yang melonjak tajam akibat varian delta di pertengahan 2021 menyebabkan Pemerintah berupaya keras menekan angka kasus Covid19 dengan menggenjatkan vaksinasi bagi penduduk termasuk di Kabupaten Kendal melalui posko-posko vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.



DERAJAT KESEHATAN

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, dilakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari yang terjadi selama satu bulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan menderita sakit berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.



Menurut *Hendrik L. Blumm* seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika penyakit sudah diderita, yang terbaik adalah pencegahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

MORBIDITAS

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau

menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.1 Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020

Karakteristik (1)	Angka Kesakitan		
	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)
Laki-Laki	16,84	17,92	15,24
Perempuan	17,16	20,33	18,71
Laki-laki+ Perempuan	16,99	19,11	16,95

Sumber: SUSENAS

Tabel 2.1, data morbiditas atau angka kesakitan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mencapai 16,95 persen lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 19,11 persen. Artinya, derajat kesehatan masyarakat Kendal menunjukkan peningkatan karena lebih sedikit penduduk yang mengalami sakit di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMANFAATAN FASILITAS DAN JAMINAN KESEHATAN

FASILITAS DAN JAMINAN KESEHATAN

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Kemudahan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan dapat dilihat dari akses ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan bagi penduduk. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan adalah jarak tempat



tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan.

Pada Tabel 2.2 menyajikan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal, meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik/balai kesehatan dan posyandu. Fasilitas ini meningkat sebanyak 12 unit fasilitas kesehatan. Ada sejumlah 5 rumah sakit di Kabupaten Kendal, yaitu satu rumah sakit negeri milik pemerintah (RSUD Dr. Soewondo) yang bertempat di Kecamatan Kendal dan empat rumah sakit swasta yang masing-masing bertempat di Kecamatan Kaliwungu Selatan (RS Darul Istiqomah), Kecamatan Gemuh (RS Baitul Hikmah sejumlah dua rumah sakit) dan Kecamatan Weleri (RS Islam Muhammadiyah). Selain itu ada sejumlah 51 klinik/balai kesehatan, 30 puskesmas, dan 1.433 posyandu yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.

Dari sisi jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kendal, sudah seluruhnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Bahkan ada fasilitas kesehatan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dan menjangkau hingga ke desa-desa, yakni posyandu yang melayani balita dan lansia sebagai upaya care unit dari Dinas Kesehatan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk melalui penyediaan sarana kesehatan di Kendal terlihat sudah sangat baik dan perlu untuk dipertahankan.

Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kendal, Tahun 2018-2020

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Umum	4	5	5
Puskesmas	30	30	30
Klinik/Balai Kesehatan	49	49	51
Posyandu	1.423	1.423	1.433
Jumlah	1.506	1.507	1.519

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka

Pembangunan nasional di bidang kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selain melalui penyediaan sarana kesehatan, pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.



Tabel 2.3 Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan dan Berobat jalan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Kendal 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	52,72	59,72	39,99
Perempuan	58,29	67,82	48,03
Kendal	55,59	63,97	44,26

Sumber: SUSENAS

Dari Tabel 2.3 terlihat di tahun 2019 sejumlah 63,97 persen penduduk Kabupaten Kendal yang mengalami keluhan kesehatan telah berobat jalan, artinya bahwa kesadaran akan kesehatan dengan berkonsultasi ke fasilitas kesehatan meski berobat jalan sudah semakin baik. Karena hal ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2018 yang sebesar 55,59 persen. Namun di tahun 2020 jumlah penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan dan berobat jalan menurun yaitu sebesar 44,26 persen, hal ini kemungkinan karena adanya virus Covid19 menyebabkan penduduk enggan berkunjung ke fasilitas kesehatan.

Pemerintah melalui program Indonesia sehat telah berupaya memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin melalui program BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS yang diluncurkan tanggal 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini bertujuan untuk: 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) Memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi.



Upaya yang sama juga terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, selain KIS ada pula Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang

diintegrasikan dalam JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS dengan memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan.



TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

IMUNISASI

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan mendapatkan kekebalan dari beberapa penyakit berbahaya, memperkecil resiko untuk sakit dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Imunisasi tersebut dikatakan lengkap jika seorang bayi telah melaksanakan satu kali imunisasi BCG, 3 kali imunisasi DPT, 3 kali imunisasi polio, 1 kali imunisasi campak/MR dan 3 kali imunisasi hepatitis B.



Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat Imunisasi dan Jenis Imunisasi, 2019-2020

Jenis Kelamin	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2019	94,27	90,46	94,56	73,88	96,07
2020	92,81	87,40	91,97	73,62	94,62

Sumber: Susenas

Berdasarkan hasil Susenas 2019 dan 2020, dilihat berdasarkan masing-masing jenis imunisasi pada bayi usia 0-59 bulan, tanpa melihat berapa kali pernah dilakukan imunisasi tersebut, rata-rata lebih dari 80 persen balita sudah melaksanakan imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Hanya imunisasi campak yang persentasenya belum mencapai 80 persen. Secara umum, pemberian imunisasi balita di Kendal terlihat sudah cukup baik karena sudah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Faktor yang menghambat pemberian imunisasi campak dan masih banyaknya balita yang belum terimunisasi secara lengkap perlu dilakukan penelitian dan dilakukan terobosan dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sehingga pencapaiannya mampu lebih baik lagi.

PEMBERIAN ASI

Selain pemenuhan gizi ibu selama kehamilan, sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Sementara dari sisi pemberian ASI eksklusif untuk Batuta di Kendal, telah mencapai 99,38 persen di tahun 2019, sedikit menurun di tahun 2020 sebesar 95,64 persen, hal ini menunjukkan kesadaran tinggi bagi pemberian gizi bayi melalui ASI sudah sangat baik dan gencarnya kampanye pemberian ASI eksklusif dari Dinas terkait.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang diberi ASI di Kabupaten Kendal, Tahun 2019-2020

Jenis Kelamin	Pernah diberi ASI	Masih Diberi ASI
(1)	(2)	(3)

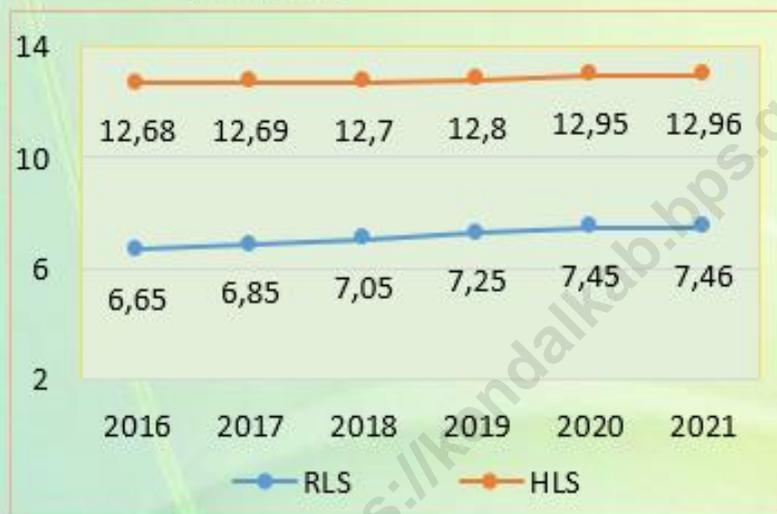
2019	99,38	90,27
2020	95,64	81,63

Sumber: SUSENAS

<https://kendalkab.bps.go.id>

INDIKATOR PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL 2021

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kendal 2016-2021



Salah satu
diantara
komponen
penting
kualitas SDM
adalah
Pendidikan

Rata-rata Lama
Sekolah (RLS): 7,46
tahun

Harapan Lama
Sekolah (HLS): 12,96
tahun

APS (persen):
07-12 th: 99,64
13-15 th: 94,44
16-18 th: 69,74



BAB III

PENDIDIKAN

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu potensi, namun dapat juga menjadi sumber permasalahan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terlebih pada era revolusi industri 4.0 saat ini, keberhasilan suatu negara di kancah internasional tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif, seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, justru menjadi faktor yang lebih penting. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas suatu negara mampu mengatur perekonomiannya sehingga mampu bersaing dengan negara lain.



Pembangunan di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, misalnya ketersediaan sumber daya alam, finansial, perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut tentu dapat terlaksana dengan baik jika ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, dapat dikatakan bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) telah sangat tersedia. Namun, dari segi kualitas perlu diberikan perhatian khusus agar dapat tercipta SDM yang tangguh dan berdaya guna tinggi.

Peningkatan kualitas SDM harus tetap dilakukan, dengan harapan SDM yang berkualitas mampu berpengaruh positif terhadap pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dilakukan guna setiap individu mampu menghadapi tantangan dan persaingan global. Salah satu komponen primer yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas SDM adalah sektor pendidikan, hal ini disebabkan pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan penentu kemajuan suatu bangsa dimasa depan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam upaya pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam setiap program pemerintah karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik berat pendidikan formal lebih ditekankan pada upaya menaikkan mutu pendidikan, memperluas pendidikan dasar, dan meningkatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain adalah pengadaan dan peningkatan sarana pendidikan, program wajib belajar, pemberian beasiswa, dan lain-

lain. Pendidikan memiliki andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa secara ekonomi dan sosial, sehingga keberhasilan pembangunan di bidang ini dapat menjadi salah satu parameter utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tahun 2020, masa pandemic Covid19, kegiatan pembelajarn tetap dilakukan meski tidak melalui tatap muka langsung. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara virtual akibat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa pandemic.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid Kelas, serta Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut tingkat pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.



RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH

Peningkatan kualitas pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak positif yang nyata pada mendatang. Penurunan angka putus sekolah menjadi program prioritas dalam kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah. Peningkatan tenaga pengajar melalui kegiatan pelatihan juga terus dilakukan. Selain program langsung, peningkatan sarana pendidikan melalui pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah juga telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya fasilitas pendidikan yang semakin memadai dapat semakin menunjang program peningkatan kualitas pendidikan yang sedang digalakan.



RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM selain harapan lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah atau *Mean Years School (MYS)*. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia pada suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kelemahan estimasi sebelumnya, yaitu dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani sehingga semakin tinggi pula kualitas intelektual penduduk suatu daerah.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kendal tumbuh rata-rata diatas 2 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2020, namun di tahun 2021 tumbuh sangat kecil yaitu sebesar 0,13 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Kendal yang lebih baik. Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan juga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan pada rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal tahun 2018 sebesar 7,05 tahun dari semula 6,85 tahun, atau tumbuh 2,92 persen, demikian pula pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kendal menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan bidang pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala yang telah dihadapi guna meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga minimal 9 tahun. Namun demikian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal telah melakukan upaya khusus dengan menginventarisir anak putus sekolah dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya, sehingga diharapkan angka RLS bisa meningkat sesuai program wajib belajar hingga jenjang SMA.

**Tabel 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Kendal (tahun), 2015-2021**

Indikator Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rata-rata lama sekolah (RLS)	6,64	6,65	6,85	7,05	7,25	7,45	7,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,41	12,68	12,69	12,70	12,80	12,95	12,96

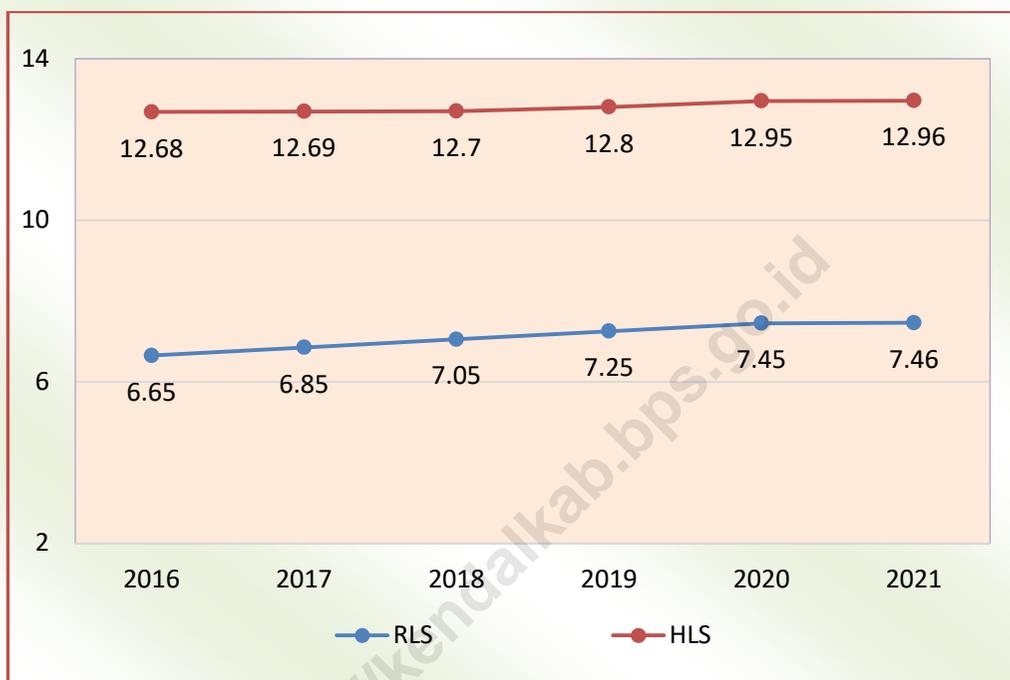
Sumber: Susenas

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang diperlihatkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah maka akan memperbesar harapan seorang anak untuk dapat mengenyam pendidikan pada masa mendatang.

Angka Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,17 persen per tahun 2020 atau 12,95 tahun, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 12,8 tahun dan di tahun 2021 juga meningkat yaitu sebesar 12,96 tahun. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Selama 5 tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah mencapai lebih dari 12 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Gambar 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal (tahun), 2016-2021



<https://kendalkab.bps.go.id>



PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator pendidikan yang dibahas sebelumnya, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat juga dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan kerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki berusia 15 tahun keatas lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas. Terlihat secara umum dari persentase penduduk laki-laki yang tamat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ ke atas SMA/ ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD hanya sebesar 12,63 persen sementara penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD mencapai 21,23 persen. Namun demikian persentase penduduk perempuan yang menamatkan Pendidikan S1 atau sarjana sebesar 5,09 persen, hal ini lebih tinggi dibanding laki-laki yang menamatkan Pendidikan sarjana yang sebesar 3,87 persen.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

Jenis Kelamin	Tidak punya ijazah	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket C	SMA/MA/SMLB/ Paket C	SMK/MAK	D I/II/III	S1+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-Laki	12,63	27,15	26,32	20,76	8,09	1,18	3,87
Perempuan	21,23	24,82	25,02	17,96	4,95	0,92	5,09
Kendal	16,88	26,00	25,8	19,38	6,54	1,05	4,47

Sumber: SUSENAS



ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan data Susenas, secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan tren pada kisaran yang hampir sama pada masing-masing kelompok umur. APS pada kelompok usia 7-12 tahun, berada pada kisaran 99-100 persen, data tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa belum semua anak berumur 7-12 tahun mengikuti pendidikan pada jenjangnya, karena tidak mencapai 100 persen. Namun demikian, angka yang dicapai tergolong memuaskan karena nilainya mendekati 100 persen.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk kelompok usia 13-15 tahun yaitu angka APS pada kisaran di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan usia 15 tahun (usia SMP) kesempatan belajar masih terbuka secara luas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, untuk jenjang usia 16-18 tahun, APS masih di bawah 80 persen, bahkan menurun pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020, yaitu sebesar 69,74 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 70,68 persen dan di tahun 2020 sebesar 70,55 persen.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kendal, 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07-12	99,54	100,00	99,44	99,64	99,99
13-15	96,04	93,99	93,79	94,44	95,00
16-18	67,77	62,81	70,68	69,74	70,55

Sumber: SUSENAS



ANGKA PARTISIPASI MURNI

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sekolah sesuai jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kendal menurut jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A berada pada kisaran lebih dari 90 persen selama 5 tahun terakhir. Sedangkan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B berada pada kisaran 70 persen. dan untuk jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C berada pada angka antara lebih dari 50-60 persen.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2016-2020

Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI/Paket A	94,6	95,05	93,87	94,56	94,80
SMP/MTs/Paket B	77,24	74,98	71,69	73,88	74,76
SMA/SMK/MA/Paket C	57,09	57,45	61,83	61,16	61,86

Sumber: SUSENAS

Capaian APM jenjang SD/ sederajat pada tahun 2017 telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (94,80 persen), namun pada tahun 2018 kembali turun dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 94,56 persen dan tahun 2020 sebesar 94,80 persen. Oleh karena itu, pekerjaan pemerintah berikutnya adalah mengupayakan agar target pencapaian APM jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat tercapai pada tahun tahun berikutnya.

Upaya Pemerintah dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Kendal cukup baik, dengan mengumpulkan data anak putus sekolah, dan diberikan dukungan untuk bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.



KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan dan infrastruktur pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain jumlah sekolah, murid, dan guru, rasio murid-guru, serta rasio guru-sekolah.

JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, (Tabel 3.5), Jumlah fasilitas sekolah dasar (SD) yang ada di Kabupaten Kendal baik negeri, swasta, maupun madrasah ibtidaiyah pada tahun 2020, bertambah 2 sekolah, dari 725 sekolah menjadi 727 sekolah. Jumlah murid sekolah dasar pada tahun 2019 sebanyak 101.312 murid dan 2020 meningkat menjadi 101.891 murid, demikian pula jumlah guru yang mengajar di tingkat pendidikan SD bertambah sebanyak 292 orang.

Secara total jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah infrastuktur bangunan sekolah bertambah 3 bangunan, jumlah siswa/siswi bertambah 2.066 murid pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Dan jumlah guru pun bertambah sebanyak 711 orang.

Indikator selanjutnya yakni rasio murid-guru, yang merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam

mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.

Tabel 3.5 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Kendal, Tahun 2019/2020-2020/2021

Jenjang Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI/ Paket A	725	727	101.312	101.891	7.817	8.109
SMP/MTs/ Paket B	153	154	45.533	47.128	2.882	3.087
SMA/SMK/ MA/ Paket C	100	100	42.636	42.528	2.419	2.633
Jumlah	978	981	189.481	191.547	13.118	13.829

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan921 Kabupaten Kendal184

Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya 1 orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektifitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pendalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi dalam kelas.

Secara umum, selama tahun ajaran 2019/2020 sampai 2020/2021 terjadi penurunan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tetap dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun. Penurunan rasio murid-guru menunjukkan bahwa peningkatan jumlah siswa diimbangi dengan peningkatan jumlah guru.

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Semakin rendah nilai rasio berarti jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu semakin terbatas, sebaliknya semakin

besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, sehingga kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Secara umum, selama tahun 2019/2020 sampai 2020/2021 terdapat tendensi peningkatan rasio guru-sekolah pada semua jenjang pendidikan. Kenaikan rasio guru-sekolah cukup baik, karena proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena jumlah tenaga pengajar menjadi berimbang.

Tabel 3.6 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Kendal, 2019/2020-2019/2020

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid Guru		Rasio Guru-Sekolah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Paket A	13	13	11	11
SMP/MTs/Paket B	16	15	19	20
SMA/SMK/MA/Paket C	18	16	24	26
Semua jenjang	14	14	13	14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

<https://kendalkab.go.id>

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KENDAL 2021

Srategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*.

TPAK (%)
2020: 70,50
2021: 69,93

TPT (%)
2020: 7,55
2021: 7,56



Jumlah Angkatan Kerja
2019: 504.535 orang
2020: 533.376 orang

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat segera diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, banyaknya pekerja anak, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sebagainya.

Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan Kabupaten Kendal ke depan. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan, sangat dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*.

Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja.

Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan

Dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021, pengangguran menjadi fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilatarbelakangi karena pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya

kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Pandemi Covid19 berdampak pada ketenagakerjaan, dimana sejumlah perusahaan memberhentikan sementara pegawai karena produksinya yang berkurang selama pandemi.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Jawa Tengah. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau

yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Setelah sempat menurun di tahun 2018, TPAK kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 67,71 persen. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Tabel 4.1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal, 2017-2021

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2017	66,49	4,93
2018	66,10	6,06
2019	67,71	6,31
2020	70,50	7,55
2021	69,93	7,56

Sumber: SAKERNAS

TPAK menggambarkan penduduk yang aktif secara ekonomi, dari Tabel 4.1 terlihat persentase TPAK pada tahun 2020 meningkat yaitu sebesar 70,50 persen disbanding tahun 2019 yang sebesar 67,71 persen. Hal ini bermakna bahwa aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk tak bisa ditinggalkan, meski pandemi penduduk tetap berupaya untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal atau bahkan serabutan. Meski demikian tahun 2021 angka TPAK sedikit menurun yaitu sebesar 69,93 persen, masih lebih tinggi disbanding tahun 2019.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kendal selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 6,31 persen di tahun 2019 menjadi 7,55 persen di 2020 dan 7,56 pada tahun 2021. Kondisi ini perlu diteliti lagi lebih jauh, apakah meningkatnya jumlah pengangguran di

Kendal ini diakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan, atautkah ada kecenderungan mereka yang berpendidikan menengah ke atas lebih memilih-milih pekerjaan dibandingkan yang pendidikan rendah, sehingga mereka setelah selesai sekolah tidak segera memperoleh pekerjaan atautkah maraknya perdagangan atau online shop belum terdata secara optimal.

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu. Jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kendal tahun 2019 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2020

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Bekerja		Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
≤ Sekolah Dasar (SD)	206.355	208.980	7.004	7.965	213.359	216.945
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	92.995	102.359	6.714	5.337	99.709	107.696
Sekolah Menengah Atas (SMA)	130.072	134.552	15.118	23.800	145.190	158.352
Perguruan Tinggi (PT)	43.290	47.171	2.987	3.212	46.277	50.383
Jumlah	472.712	493.062	31.823	40.314	504.535	533.376

Sumber: SAKERNAS

Melihat struktur angkatan kerja menurut tingkat pendidikan, dari Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah terbesar pekerja dengan jenjang pendidikan SD, sebesar 43,65 persen di tahun 2019 dan 42,38 persen di tahun 2020, dan SMA sebesar 27,29 persen. Sedangkan jumlah pekerja dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 9,16 persen di tahun 2019, meningkat di tahun 2020 menjadi 9,57 persen, sedangkan jenjang pendidikan SMP sebesar 20,76 persen pada tahun 2020.



LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu primer (pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan; pengadaan listrik, gas; pengadaan air serta konstruksi), dan tersier (perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya).

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Kendal, 2017-2020

Sektor ¹⁾	Persentase Penduduk 15+ Yang Bekerja Menurut Sektor			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	27,92	26,30	23,33	24,75
2	29,68	22,95	30,90	30,98
3	42,40	50,75	45,77	44,27

Sumber: SAKERNAS

Catatan/Note:¹⁾

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*

2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi *Mining and Quarrying; Manufacturing; Electricity and Gas; Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities; Construction*
 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles; Transportation and Storage; Accommodation and Food Service Activities; Information and Communication; Financial and Insurance Activities; Real Estate Activities; Business Activities; Public Administration and Defence; Compulsory Social Security; Education; Human Health and Social Work Activities; Other Services Activities*
- Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Melihat perkembangan lapangan usaha selama 2017-2020, persentase penduduk yang bekerja pada sektor primer semakin menurun, yang semula pada tahun 2017 sebesar 27,92 persen menjadi 26,30 persen pada tahun 2018 dan 23,33 persen pada tahun 2019, sedikit meningkat di tahun 2020 sebesar 24,75 persen.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan memiliki porsi terbesar pada sektor primer semakin lama kekuatannya dalam menyerap tenaga kerja semakin melemah. Ketergantungan pertanian terhadap kondisi iklim, dan semakin tergerusnya lahan pertanian menjadi salah satu penyebab lapangan usaha ini kurang diminati oleh para pekerja milenial, akibatnya penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini semakin menurun, sehingga perlu adanya inovasi di bidang pertanian untuk membuka peluang bagi tenaga kerja pada sektor ini.

Kondisi yang berbeda pada sektor sekunder yang pada tahun 2017-2019 penyerapan tenaga kerjanya berfluktuasi. Pada tahun 2017 sektor sekunder mampu menyerap tenaga kerja 29,68 persen dan menjadi 22,95 persen di tahun 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 30,90 persen, tahun 2020 sebesar 30,98 persen. Sebaliknya, sektor tersier menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kendal dan setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2017 sektor tersier mampu menyerap 42,40 persen tenaga kerja dan meningkat menjadi 50,75 persen di tahun 2018, begitu pula pada 2019, meningkat menjadi 45,77 persen dan tahun 2020 sebesar 44,27 persen. Perkembangan era industri 4.0, perkembangan arus TI yang cepat menjadi pemicu inovasi-inovasi di dunia industri, yang kemudian melahirkan start up-start up yang dirintis oleh para milenial muda.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk 15+ Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan				Jumlah
	≤ Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Perguruan Tinggi (PT)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,95	18,44	9,28	1,93	24,75
Manufaktur	25,50	40,27	39,91	9,63	30,98
Jasa	31,55	41,29	50,81	88,44	44,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SAKERNAS

PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN

Jika dibedakan menurut jenjang pendidikan dan lapangan usaha, terlihat bahwa sector pertanian menyerap tenaga kerja terbesar dengan pendidikan SD, yaitu sebesar 42,95 persen, jasa sebesar 31,55 persen dan manufaktur sebesar 25,50 persen. Penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan perguruan tinggi terbanyak pada sector jasa, yaitu sebesar 88,44 persen, manufaktur 9,63 persen dan pertanian sebesar 1,93 persen. demikian pula untuk jenjang Pendidikan SMA juga terbanyak terserap pada sector jasa yaitu sebesar 50,81 persen.

PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS/KEDUDUKAN

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir, mayoritas penduduk Kendal bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 36,21 persen, berusaha sendiri sebesar 18,82 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 16,35 persen, selanjutnya status berusaha dibantu pekerja tetap persentasenya sebesar 2,64 persen.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status dan Lapangan Pekerjaan Utama, Kabupaten Kendal, 2019-2020

Status Pekerjaan Utama	Sektor Lapangan Usaha							
	Pertanian		Manufaktur		Jasa		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Berusaha sendiri	20,52	14,74	8,89	5,66	31,34	30,32	21,88	18,82
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	25,64	30,50	4,99	6,65	11,06	15,23	12,59	16,35
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,42	3,05	2,78	2,09	3,98	2,80	3,47	2,64

Buruh/Karyawan/ Pegawai	8,96	9,07	62,26	55,14	41,54	38,13	40,34	36,21
Pekerja bebas	15,69	15,69	14,07	19,00	2,22	3,05	9,03	11,12
Pekerja keluarga/tak dibayar	25,77	26,95	7,00	11,46	9,85	10,48	12,68	14,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SAKERNAS

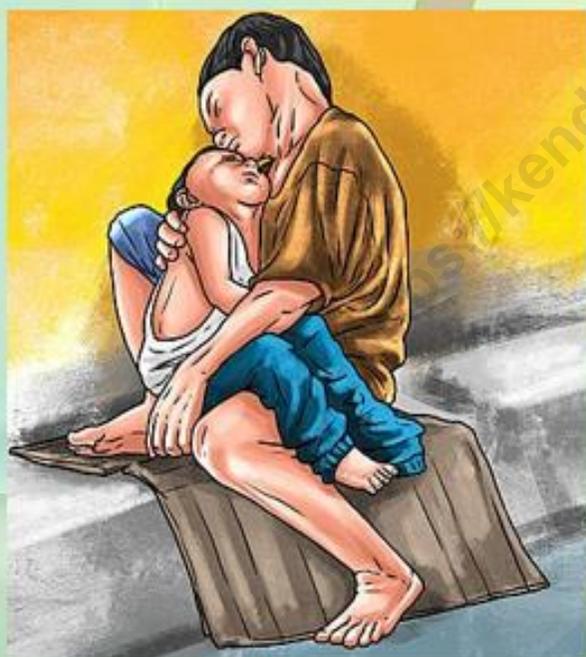
Namun demikian ini berarti bahwa tahun 2020, banyak tenaga kerja yang sudah mampu menjadi wirausaha, baik dibantu pekerja tetap maupun pekerja tidak dibayar. Dengan kata lain penduduk yang semula berusaha sendiri, kini sudah mampu menambah tenaga kerja, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Di sisi lain, tingginya persentase pekerja keluarga/tidak dibayar merupakan sinyal negatif, karena penduduk pada kelompok ini masih menjadi beban tanggungan bagi keluarga atau orang lain.

INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL

2021

Kemiskinan:

ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran



Jumlah Penduduk Miskin 2020: 97,50 ribu orang

Persentase Penduduk Miskin 2020: 9,99

Garis Kemiskinan 2020: Rp. 396.691

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): 0,25

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): 1,37

BAB V

KEMISKINAN



KEMISKINAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

BPS dalam menghitung kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi utamanya di negara-negara berkembang, yang bukan hanya mencakup dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Kendal.

Indikator-indikator yang menjelaskan tentang makna kemiskinan di suatu wilayah antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.





PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN

Selama periode 2016-2019, penduduk miskin di Kabupaten Kendal menunjukkan hal yang menggembirakan, tren terus mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun di tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kendal meningkat, dari 91,2 ribu orang bertambah menjadi 97,5 ribu orang, dengan persentase 9,99 persen. Hal ini tentunya merupakan hal yang kurang baik, meski sebenarnya dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kendal telah dirancang program-program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan non tunai bersyarat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dsb, namun demikian tak pelk pandemic Covid19 yang semula berawal dari kondisi krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi dan sosial.

Untuk menganalisis kemiskinan lebih lanjut, perlu dilihat besaran lain seperti garis kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan yang akan dibahas pada bab ini.

**Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020**

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Ribu Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
2016	107,81	11,37
2017	106,07	11,10
2018	94,70	9,84
2019	91,20	9,41
2020	97,50	9,99

Sumber: SUSENAS

Tren kemiskinan di Kabupaten kendal, semakin menurun, dari 9.84 persen pada tahun 2018 menjadi 9.41 pada tahun 2019, turun sebesar 0.43 persen, namun kembali naik di tahun 2020 yang sebesar 9,99 persen. Pandemi Covid19 berdampak cukup signifikan pada dimensi ekonomi dan social. namun demikian upaya Pemerintah menurunkan angka kasus Covid19 telah berhasil dengan gencarnya vaksinasi yang terus dilakukan hingga target lebih dari 70 persen penduduk telah divaksin. hal ini diharapkan

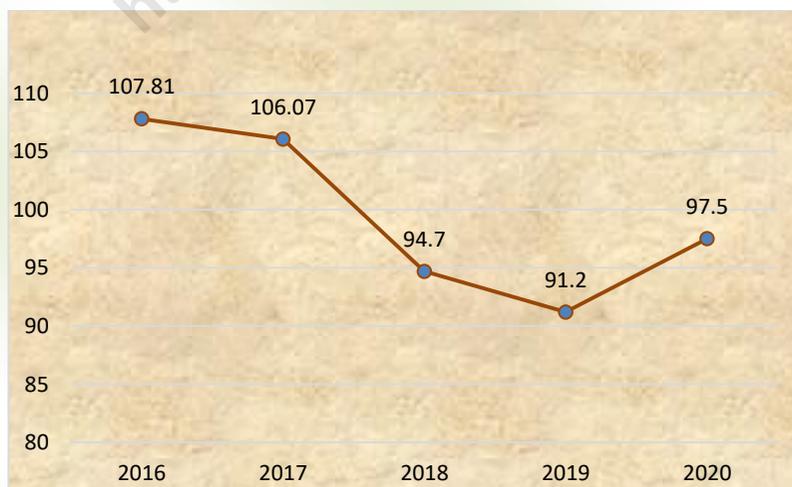
mampu membentuk imunitas wilayah yang tentu akan berdampak pada Kesehatan penduduk. Penduduk yang sehat tentunya mampu beraktivitas kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan bekerja.

Tantangan besar bagi pemerintah Kendal untuk kembali memulihkan kondisi kemiskinan bagi sebagian penduduk Untuk mencapai target yang dikehendaki tentu diperlukan upaya, dukungan dan kerja keras semua pihak secara bersama.

Gambar 5.1 Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020



Gambar 5.2 Tren Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020





GARIS KEMISKINAN (GK) INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

GARIS KEMISKINAN

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Kendal makin meningkat, pada tahun 2016, garis kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar Rp 323.078 kemudian meningkat menjadi Rp 335.497 pada tahun 2017 hingga kemudian menjadi Rp 353.127 pada tahun 2018 dan Rp. 369.769 pada tahun 2019.

Tabel 5.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal, Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rp)	323.078	335.497	353.127	369.769	396.691
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,13	1,69	1,85	1,47	1,37
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,62	0,39	0,47	0,32	0,25

Sumber: SUSENAS

INDEKS KEMISKINAN

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kendal selama periode 2016 hingga 2020 cukup menggembirakan, walaupun kembali naik pada tahun 2018, namun

di tahun 2019 kembali turun sampai pada angka 1,47, dan tahun 2020 turun menjadi 1,37.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Tak berbeda jauh dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2017, kemudian naik pada 2018 dan turun kembali di tahun 2019 sebesar 0.32, turun kembali tahun 2020 menjadi 0,25. Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal sehingga dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Terlebih dikarenakan target kemiskinan sesuai RPJMD belum dapat dipenuhi. Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Kesimpulan

Kabupaten Kendal sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak berdampingan dengan ibukota Provinsi memiliki luas 1.001,73 km², dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1.018.505 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.7 persen setahun serta rasio menurut jenis kelamin sebesar 102.2, artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

KEPENDUDUKAN

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal tahun 2020 sebesar 1.010 jiwa/km², meningkat dibanding tahun 2019 yang sebanyak 969 jiwa/km². Pesebaran penduduk di Kabupaten Kendal tergolong belum merata, namun telah tersebar di 20 Kecamatan, dengan persentase penduduk tertinggi berada di wilayah kecamatan Boja sebesar 8,09 persen, disusul Kaliwungu sebesar 6,5 persen, Weleri 5,88 persen dan Kendal 5,87 persen. Sedangkan persentase penduduk terendah di wilayah kecamatan Plantungan, sebesar 3,19.

Indikator produktivitas penduduk ditunjukkan oleh angka *dependency ratio*, yang merupakan angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Di Kabupaten Kendal selama periode 2015-2019 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan, yaitu berada pada posisi 45.28 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 45 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan yang cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong produksi, yaitu saat terjadi fenomena Bonus Demografi.

KESEHATAN

Indikator kesehatan dan gizi dapat dilihat pada angka umur panjang dan hidup sehat. Hal ini terlihat pada angka kesakitan (morbiditas) yaitu menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mencapai 16,95 persen menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 19,11 persen. Artinya, derajat kesehatan

masyarakat Kendal menunjukkan peningkatan karena lebih banyak penduduk yang lebih rendah mengalami sakit di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase penduduk kabupaten Kendal yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2020 sebesar 44,26 persen, dengan komposisi 39,99 persen penduduk laki-laki dan 48,03 persen penduduk perempuan. Artinya, penduduk perempuan di Kendal lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibanding penduduk laki-laki. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus disosialisasikan melalui program GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan harapan dapat semakin mengurangi angka kesakitan di masyarakat.

PENDIDIKAN

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Peningkatan kualitas SDM harus tetap dilakukan, dengan harapan SDM yang berkualitas mampu berpengaruh positif terhadap pembangunan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kendal yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang produktif.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal pada tahun 2021 sebesar 7,46 tahun, sedikit meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 7,45 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kendal menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan bidang pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala yang telah dihadapi guna meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga minimal 9 tahun.

Selama periode 2015 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang semakin meningkat meskipun kecil, demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah juga makin meningkat. Selama periode lima tahun terakhir, angka Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,44 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah mencapai 12,95 dan di tahun 2021 mencapai 12,96 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

KETENAGAKERJAAN

Indikator kesejahteraan lainnya yang cukup strategis adalah ketenagakerjaan. Pada tahun 2021, persentase TPAK menurun dari 70,50 di tahun 2020 menjadi 69,93 persen di tahun 2021 dan pengangguran yaitu angka TPT meningkat dari 7,55 persen di tahun 2020 menjadi 7,56 persen di tahun 2021, hal ini harus mendapat perhatian dari

Pemerintah agar pengangguran menurun, dengan membuka peluang usaha bagi tenaga kerja sesuai kompetensi.

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Persentase jumlah penduduk miskin di tahun 2020 meningkat disbanding tahun 2019, yaitu dari 91,2 ribu orang bertambah menjadi 97,5 ribu orang dengan persentase sebesar 9,99 persen.

Hal yang mesti diwaspadai adalah meningkatnya indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan bahwa masih terdapat penduduk miskin dengan pengeluaran yang jauh dibawah garis kemiskinan. pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu dari 1,47 di tahun 2019 menurun menjadi 1,37 persen. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan masih ada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri. pada tahun 2020 angka P2 sebesar 0,25 menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,32. Hal ini mberarti bahwa tingkat kesenjangan penduduk miskin semakin rendah.

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal sehingga dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Terlebih dikarenakan target kemiskinan sesuai RPJMD belum dapat dipenuhi. Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- BPS. 2019, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten_ Kota Tahun 2019. Jakarta: BPS
- BPS. 2020, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten_ Kota Tahun 2020. Jakarta: BPS
- BPS Kabupaten Kendal. 2018, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kendal 2018. Kendal: BPS Kabupaten Kendal
- BPS Kabupaten Kendal. 2019, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kendal 2019. Kendal: BPS Kabupaten Kendal
- BPS Kabupaten Kendal. 2020, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kendal 2020. Kendal: BPS Kabupaten Kendal
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Kaula Karima, Endang L. Achadi. 2012. Status Gizi Ibu dan Berat Badan Lahir Bayi. Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.7 No 3.: 111-112

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351
Telp. (0294)381461, Fax (0294) 383461
Email : bps3324@bps.go.id
Homepage : <http://kendakab.bps.go.id>

ISBN 978-623-96798-3-5



9 786239 679835